

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

NO	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai Terkait	Penyebab	Penanganan/Pencegahan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pemanfaatan aset BMN yang tidak sesuai peruntukannya, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukan menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar pelaksanaan tugas.	Semua Pejabat/ Pegawai	1. Penggunaan aset oleh pihak lain. 2. Penggunaan diluar kepentingan dinas	1. Monitoring dan evaluasi secara periodek terhadap Penatausahaan BMN 2. Meningkatkan komitmen dari pengguna	
2	Pengangkatan tenaga kontrak secara tidak terbuka, obyektif dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk afiliasi	Semua pejabat/ Pegawai	1. Hubungan afiliasi 2. Adanya unsur balas budi 3. Gratifikasi	Proses rekrutman secara terbuka	
3	Penempatan pegawai dalam jabatan yang cenderung mengakomodir keinginan pimpinan atau pegawai	Pejabat Terkait	1. Hubungan afiliasi 2. Adanya unsur balas budi 3. Gratifikasi	Penyusunan pola mutasi dan Promosi sesuai kompetensi jabatan	
4	Penentuan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan	Pejabat Terkait	1. belum adanya ketentuan yang eksplisit tentang pengaturan jenis hukuman 2. Keputusan akhir ada ditangan Pimpinan puncak	Aturan disiplin Pegawai lebih diperketat	

5	Dalam rangka melayani permintaan informasi ada perlakuan yang berbeda	Tim pengelola informasi	1. Adanya gratifikasi 2. Hubungan afiliasi	1. Memaksimalkan SOP layanan informasi berbasis TI 2. Melakukan survey kepuasan pelayanan	
6	Penyalahgunaan Jabatan	Pejabat Terkait	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Pengawasan kode etik dan disiplin pegawai	

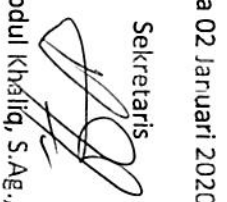
No	Uraian Bentuk Kepentingan	Pejabat/Pegawai	Penyebab	Penanganan/Pencegahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7	Penentuan nama-nama pegawai yang masuk dalam Tim penyelenggara suatu kegiatan	Pejabat Terkait	1. Hubungan Afiliasi 2. Gratifikasi	Dilakukan pendataan dan pemerataan keterlibatan pegawai/pejabat dalam Tim dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, bukan atas dasar suka/tidak suka	
8	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak efektif dan efisien, serta pemilihan penyedia yang tidak sesuai mekanisme pengadaan	Pejabat Pengadaan	1. Hubungan Afiliasi 2. Gratifikasi	1. Keterbukaan mekanisme pengadaan 2. Pengambilan keputusan dalam pengadaan disampaikan dalam rapat	
9	Penanganan/Penyelesaian perkara yang tidak independen	Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti	1. Adanya gratifikasi 2. Hubungan afiliasi	Memaksimalkan pembinaan dan diskusi hukum	



 Mengetahui
 Ketua,
 Hj. Nurul Hikmah, S.A.G., MH

Panitera,

 H. Hushnah Taparrood, S.H.

Negara 02 Januari 2020
 Sekretaris

 H. Abdul Khaliq, S.Ag., MH